

## IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK MELALUI GERAKAN PADURAKSA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DI SMP NEGERI 1 MANTUP LAMONGAN

**Nur Afif Ayuni**

(Universitas Negeri Surabaya, Indonesia), [nurafifayuni123@gmail.com](mailto:nurafifayuni123@gmail.com)

**Raden Roro Nanik Setyowati**

(Universitas Negeri Surabaya, Indonesia), [naniksetyowati@unesa.ac.id](mailto:naniksetyowati@unesa.ac.id)

### Abstrak

Penelitian dilatarbelakangi oleh pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi siswa, melalui Sekolah Ramah Anak (SRA). Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak melalui Gerakan Paduraksa di SMP Negeri 1 Mantup, menganalisis hambatan pelaksanaan Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 1 Mantup, dan mengevaluasi pelaksanaan Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 1 Mantup. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data yakni dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Uji keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi teknik. Analisis data menggunakan teknik analisis Miles Huberman, dengan langkah penelitian diantaranya pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian di SMP Negeri 1 Mantup. Informan penelitian adalah Kepala Sekolah, BK, TPPK, dan siswa SMP Negeri 1 Mantup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 1 Mantup telah mencapai tahap Maju, sesuai dengan kriteria Sekolah Ramah Anak pada Juknis Gerakan Paduraksa. Hambatan yang dihadapi yakni masih adanya kekerasan psikis antar siswa dan kurangnya keberanian siswa untuk melapor. Berdasarkan hasil evaluasi, program ini berhasil dilaksanakan sesuai dengan kriteria keberhasilan implementasi kebijakan menurut teori Implementasi Edward III.

**Kata Kunci:** Sekolah Ramah Anak, Gerakan Paduraksa, Kekerasan Psikis.

### Abstract

*The background of this research is the importance of creating a safe and comfortable educational environment for students, through Child-Friendly Schools (SRA). The objectives of this research are to describe the implementation of the Child-Friendly School program through the Paduraksa Movement at SMP Negeri 1 Mantup, to analyze the obstacles to the implementation of Child-Friendly Schools at SMP Negeri 1 Mantup, and to evaluate the implementation of Child-Friendly Schools at SMP Negeri 1 Mantup. This research uses a qualitative approach with a case study research design. Data collection techniques are interviews, observations and documentation. The data validity test used is technical triangulation. Data analysis uses Miles Huberman analysis techniques, with research steps including data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The location of the research is at SMP Negeri 1 Mantup. The research informants are the Principal, BK, TPPK, and students of SMP Negeri 1 Mantup. The results of the study indicate that the implementation of the Child-Friendly School program at SMP Negeri 1 Mantup has reached the Advanced stage, in accordance with the criteria for Child-Friendly Schools in the Paduraksa Movement Technical Guidelines. The obstacles faced were the continued existence of psychological violence between students and the lack of courage of students to report. Based on the evaluation results, this program was successfully implemented in accordance with the criteria for successful policy implementation according to Edward III's Implementation Theory.*

**Keywords:** Child Friendly Schools, Paduraksa Movement, Psychological Violence.

### PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sebuah proses pengajaran dan pelatihan dengan tujuan memberikan pengetahuan dan meningkatkan keterampilan baik secara fisik maupun rohani yang dilaksanakan baik secara formal ataupun non formal oleh individu ataupun kelompok (Molzana & Fernandes, 2023). Pendidikan menjadi satu hal paling utama dalam kehidupan manusia, melalui pendidikan menjadikan seseorang mengembangkan dirinya baik

secara intelektual, mental, emosional, sosial, dan lain sebagainya. Sejalan dengan yang disampaikan oleh Iis Margiyanti & Siti Tiara Maulia (2023), bahwasannya pendidikan merupakan investasi terbesar dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan bermutu.

Lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman sangatlah penting bagi kelangsungan belajar siswa, dimana lingkungan sekolah yang aman bukan hanya

berada diluar pembelajaran namun dalam melakukan proses pembelajaran juga harus menciptakan keamanan dan kenyamanan siswa. Sebagai institusi pendidikan, sekolah harus menjadi tempat yang memberikan rasa aman bagi peserta didik (Herianto et al., 2020).

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Permendikbudristek Nomor 46 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam satuan Pendidikan sebagai perubahan atas Permendikbud RI Nomor 82 tahun 2015 mengenai pencegahan serta penanganan terhadap adanya kekerasan dalam satuan pendidikan, dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman,. Adanya Permendikbud tersebut tentu tidak lepas dari upaya untuk menciptakan sekolah nyaman dan aman bagi peserta didik dengan memberikan perlindungan dari kekerasan di lingkungan pendidikan.

Candra (2018:66) dalam penelitiannya menjelaskan bahwasannya, anak wajib memperoleh perlindungan dari tindak kekerasan baik di sekolah atau dalam lembaga pendidikan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan atau teman sebayanya. Pada pasal 21 Permendikbudristek No 46 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam satuan Pendidikan menjelaskan secara rinci mengenai keamanan serta kenyamanan yang diperlukan dalam satuan pendidikan, mulai dari keamanan dalam pembelajaran, keamanan serta kenyamanan dalam sarana dan prasarana termasuk bagi peserta didik yang menyandang disabilitas, pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di lingkungan pendidikan, hingga tugas dari TPPK seperti pembuatan kanal aduan dan juga ruang pemeriksaan. Dari adanya Permendikbudristek ini menunjukkan bahwasannya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman dapat menunjang proses belajar siswa selama di sekolah.

Menurut Nasir (2018) menjelaskan bahwasannya perasaan tidak aman bagi peserta didik yang memiliki pengalaman kekerasan di sekolah dapat memicu peningkatan depresi dan juga berdampak pada menurunnya hasil belajar peserta didik (Shofiyyatuzzahrah et al., 2023). Selain itu dampak dari adanya kekerasan di sekolah menurut Saraswati (2015:138) dapat berpengaruh pada mental, fisik serta sosial peserta didik. Dampak dari kekerasan mental seperti stres, depresi, rendah diri, dll. Sedangkan dampak kekerasan fisik seperti luka-luka, memar hingga menyebabkan kematian. Serta dampak sosial seperti menjadi individualism dan tidak mempercayai orang lain karena takut akan jiwanya terancam. Dari beberapa dampak tersebut menunjukkan bahwasannya lingkungan sekolah yang aman dari kekerasan sangatlah penting bagi perkembangan pembelajaran peserta didik.

Selain Permendikbudristek yang memberikan upaya dalam mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman, juga terdapat peraturan menteri No 8 tahun 2014 mengenai Sekolah Ramah Anak (SRA). Adanya peraturan mengenai SRA ini tentu tidak lepas dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi siswa dari kekerasan guna menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh (Afifah & Kunaenih, 2023) menunjukkan kuatnya pengaruh SRA terhadap motivasi belajar siswa sebesar 0,428. Beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa adalah peran guru, lingkungan sekolah, fasilitas sekolah, hubungan pertemanan dan masih banyak lagi. Dengan demikian dapat diketahui bahwasannya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman dapat mempengaruhi peningkatan motivasi belajar siswa.

Adanya Permendikbudristek mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan dalam satuan pendidikan serta peraturan menteri mengenai Sekolah Ramah Anak, juga didasarkan dalam menanggapi banyaknya kekerasan yang marak terjadi dalam satuan pendidikan. Kekerasan dalam Permendikbudristek Nomor 46 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam satuan Pendidikan diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan kepada seseorang dan memberikan dampak serta penderitaan bagi korban baik secara mental, fisik, maupun intelektual, dan menjadikan kehilangan kesempatan dalam berbagai hal serta timbul rasa tidak berdaya.

Komisi Perlindungan Anak (KPAI) menyatakan bahwasannya sejak januari hingga agustus 2023 tercatat 2.355 kasus kekerasan pada anak (dilansir dari isu sepekan bidang kesejahteraan masyarakat DPR RI komisi VIII). Dari banyaknya kasus tersebut terdapat 861 kasus yang terjadi dalam satuan pendidikan, berbagai permasalahan kasus tersebut diantaranya adalah 487 kasus kekerasan seksual, 236 kasus kekerasan secara fisik/psikis, 87 kasus perundungan, 27 kasus korban pemenuhan fasilitas pendidikan, serta 24 kasus sebagai korban dari adanya kebijakan. Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi dalam satuan pendidikan tentu menjadi satu hal yang memprihatinkan, dimana sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi siswa dalam menempuh pendidikan justru menjadi salah satu tempat yang menakutkan bagi mereka.

Maraknya kasus kekerasan yang terjadi, menjadikan Sekolah Ramah Anak merupakan satu hal yang penting dalam memberikan perlindungan terhadap peserta didik. Program Sekolah Ramah Anak (SRA) merupakan satu program penting dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak di sekolah dalam skala yang lebih luas (Herianto et al., 2020). Program SRA merupakan upaya dalam memberikan perlindungan serta pemenuhan hak

peserta didik selama di sekolah, sehingga dapat menciptakan proses belajar mengajar yang nyaman bagi peserta didik (Afifah & Kunaenih, 2023). Maka dari itu SRA menjadi perhatian bagi banyak peneliti, hal ini di tunjukan dari banyaknya penelitian mengenai Sekolah Ramah Anak dengan berbagai macam fokus penelitian.

Menanggapi banyaknya kasus kekerasan yang terjadi dalam satuan pendidikan, pemerintah Kabupaten Lamongan mengeluarkan sebuah program yang dinamakan dengan Gerakan Paduraksa. Berdasarkan pada Surat Edaran dan juknis Gerakan Paduraksa Nomor 400.5.4/ 3376/ 413.101/ 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Gerakan Paduraksa merupakan gerakan pendidikan terpadu Sekolah Ramah Anak (SRA); akreditasi sekolah; sekolah sehat; serta adiwiyata sekolah. Tujuan utama dari Gerakan Paduraksa ini adalah meningkatkan mutu pendidikan dengan membentuk karakter siswa melalui 4 hal yang menjadi prioritas dari Gerakan Paduraksa, diantaranya adalah Sekolah Ramah Anak yang memberikan perlindungan terhadap anak di sekolah; akreditasi sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan; sekolah sehat yang bertujuan menjamin kesehatan mental dan fisik seluruh warga sekolah; serta adiwiyata sekolah yang mewujudkan sekolah yang peduli terhadap lingkungan.

Gerakan Paduraksa merupakan program yang dicanangkan pemerintah Kabupaten Lamongan untuk dilaksanakan oleh sekolah-sekolah yang berada di Kabupaten Lamongan. SMP Negeri 1 Mantup merupakan salah satu sekolah yang telah melaksanakan program Gerakan Paduraksa. Dilansir dari website sekolah SMP Negeri 1 mantup, sekolah ini menjadi pusat dalam kegiatan launching Gerakan Paduraksa pada 19 Desember 2023. Dengan demikian SMP Negeri 1 Mantup menjadi objek dalam penelitian ini karena menjadi sekolah yang telah menjalankan program Gerakan Paduraksa. Selain itu SMP Negeri 1 Mantup juga telah mendeklarasikan diri sebagai Sekolah Ramah Anak (SRA) yang menjadi salah satu bentuk pelaksanaan dari program Gerakan Paduraksa.

Hasil wawancara awal bersama guru BK SMP Negeri 1 Mantup bapak Arman W.P. pada 29 April 2024 menyatakan bahwasannya kekerasan yang terjadi antar siswa di sekolah masih sering terjadi, meskipun kekerasan bukan pada skala yang berat. Bentuk kekerasan yang terjadi di SMP Negeri 1 Mantup adalah kekerasan secara fisik maupun psikis. Guru BK SMP Negeri 1 Mantup mengatakan bahwasannya kekerasan secara psikis yang sering terjadi seperti berkata-kata kasar; memanggil temannya dengan menggunakan nama orang tuanya ataupun memanggil teman mereka dengan nama hewan, sedangkan kekerasan secara fisik sering dilakukan siswa dengan memukul kepala temannya.

Merujuk pada Permendikbudristek Nomor 46 tahun 2023 mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan dalam satuan pendidikan, pada pasal 6 ayat (1) menyebutkan berbagai macam bentuk kekerasan diantaranya ialah kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, kebijakan yang mengandung kekerasan, serta bentuk kekerasan yang lainnya. Berangkat dari hasil wawancara bersama guru BK SMPN 1 Mantup kasus kekerasan yang terjadi di sekolah lebih banyak merujuk pada kasus kekerasan psikis sebagaimana yang dijabarkan pada pasal 8 ayat (1) Permendikbudristek Nomor 46 tahun 2023 mengenai pengertian dari kekerasan psikis.

Berdasarkan pada hal diatas menunjukkan bahwasannya Sekolah Ramah Anak (SRA) melalui Gerakan Paduraksa menjadi satu hal penting dalam upaya mengatasi adanya kekerasan di SMP Negeri 1 Mantup. Melalui pelaksanaan SRA ini dapat mengetahui bagaimana program ini berjalan dan keberhasilan dari adanya SRA dalam memberikan perlindungan terhadap anak di sekolah. Mengingat kekerasan dalam satuan pendidikan saat ini telah menjadi hal yang memprihatinkan dan menjadi perhatian yang serius karena pendidikan di Indonesia telah mengalami darurat perundungan atau kekerasan. Dengan demikian penelitian ini penting dilakukan untuk dapat mengetahui pelaksanaan Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 1 Mantup melalui program Gerakan Paduraksa.

Sekolah Ramah Anak (SRA) yang dilakukan melalui Gerakan Paduraksa dilaksanakan dengan berbagai kegiatan diantaranya yakni penghargaan terhadap hak-hak anak di sekolah, pembelajaran menyenangkan yang dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas, selain itu pemberian hukuman pada siswa lebih ditunjukkan pada hukuman yang cenderung mengedukasi dan melalui bimbingan karakter siswa sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Program lainnya dilaksanakan dengan melalui pembiasaan hidup sehat siswa diantaranya adalah pembiasaan cuci tangan, makan bergizi dengan membawa bekal dari rumah, kantin sehat, serta kegiatan menanam satu pohon di kebun syboga. Dengan demikian menunjukkan bahwasannya terdapat berbagai kegiatan yang dilakukan oleh SMP Negeri 1 Mantup dalam melindungi siswa di sekolah, serta yang membedakan antara program SRA melalui Gerakan Paduraksa dengan SRA lainnya adalah adanya kriteria khusus dalam setiap tahapan pelaksanaan program SRA.

Pengimplementasikan Sekolah Ramah Anak melalui Gerakan Paduraksa, mendasar pada Surat Edaran dan juknis Gerakan Paduraksa Nomor 400.5.4/ 3376/ 413.101/ 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Pada poin B Kriteria dan kegiatan dalam Surat edaran tersebut memaparkan tahapan tahapan Sekolah

Ramah Anak melalui Gerakan Paduraksa. Pada penelitian ini akan mengetahui tahapan yang dicapai oleh SMP Negeri 1 Mantup dalam mengimplementasikan Sekolah Ramah Anak melalui Gerakan Paduraksa.

Ketertarikan penulis dalam melakukan penelitian ini ialah karena pelaksanaan Sekolah Ramah Anak (SRA) melalui Gerakan Paduraksa merupakan satu hal yang baru dan belum ada sebelumnya. Hal ini karena Sekolah Ramah Anak melalui Gerakan Paduraksa adalah adanya kriteria khusus dalam setiap tahapan pengimplementasian program SRA. Sehingga dapat diketahui beberapa kegiatan secara spesifik dalam mengimplementasikan pelaksanaan Sekolah Ramah Anak, pengimplementasian Sekolah Ramah Anak melalui Gerakan Paduraksa bukan hanya memberikan perlindungan terhadap hak anak namun juga dapat meningkatkan karakter anak guna dapat meningkatkan mutu pendidikan. Dengan demikian melalui penelitian ini akan diketahui lebih dalam mengenai pengimplementasian Sekolah Ramah Anak melalui Gerakan Paduraksa dalam upaya mewujudkan perlindungan terhadap anak di SMP Negeri 1 Mantup.

Rumusan masalah penelitian ini adalah pengimplementasian program Sekolah Ramah Anak bebas anti kekerasan melalui Gerakan Paduraksa di SMP Negeri 1 Mantup, hambatan serta evaluasi dalam pengimplementasian Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 1 Mantup. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi program Sekolah Ramah Anak melalui Gerakan Paduraksa di SMP Negeri 1 Mantup, menganalisis hambatan implementasi Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 1 Mantup, dan mengevaluasi implementasi Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 1 Mantup. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dengan mengonfirmasi teori Implementasi Edward III mengenai keberhasilan Implementasi kebijakan, dengan mengkaji kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 1 Mantup. Manfaat praktis, diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan mengenai pelaksanaan Sekolah Ramah Anak melalui Gerakan Paduraksa, serta dapat menjadi contoh bagi lembaga lainnya mengenai pengimplementasian Sekolah Ramah Anak melalui Gerakan Paduraksa

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Menurut Creswell (1998) melalui pendidikan studi kasus penulis dapat mendalami suatu kasus pada satu waktu serta kegiatan seperti program; kelompok sosial; institusi ataupun proses (dalam Wahyuningsih, 2013:97). Selain itu penulis juga dapat menggali informasi secara mendalam dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data yang tepat dalam jangka waktu tertentu. Dalam penelitian ini

bermula seringnya terjadi kekerasan antar siswa di SMP Negeri 1 Mantup, seperti menjewer, memukul, mencubit, menoyor kepala. Menanggapi adanya kasus kekerasan di sekolah, SMP Negeri 1 Mantup mengimplementasikan sebuah program Sekolah Ramah Anak (SRA) yang merupakan bagian dari Gerakan Paduraksa yang telah dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan. Dengan demikian melalui penelitian ini akan mengetahui upaya yang dilakukan SMP Negeri 1 Mantup dalam memberikan perlindungan terhadap siswa dari kekerasan di lingkungan sekolah melalui program Sekolah Ramah Anak.

Penelitian dilakukan di SMP Negeri 1 Mantup. Pemilihan SMP Negeri 1 Mantup sebagai lokasi dari penelitian ini adalah karena di SMP ini telah melaksanakan program Sekolah Ramah Anak melalui Gerakan Paduraksa. Dimana Gerakan Paduraksa adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah kabupaten Lamongan untuk di terapkan di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Lamongan, serta SMP Negeri 1 Mantup ini juga menjadi sekolah yang terpilih sebagai pusat peresmian Gerakan Paduraksa pada tanggal 19 Desember 2023.

Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah SMP Negeri 1 Mantup, BK, TPPK, dan siswa SMP Negeri 1 Mantup. Pemilihan informan diatas dapat memperkuat hasil penelitian dalam menjawab permasalahan penelitian. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab tertinggi terhadap program SRA, TPPK sebagai pihak yang merancang program SRA dalam upaya pencegahan serta penanganan kasus kekerasan di sekolah. BK sebagai pihak yang mengetahui secara detil kasus kekerasan di sekolah, serta siswa sebagai sasaran dari program SRA melalui Gerakan Paduraksa dapat memberikan informasi terkait keamanan dan kenyamanan mereka di sekolah setelah adanya program SRA.

Teknik pengumpulan data penelitian adalah dengan menggunakan wawancara, observasi serta dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber yang terlibat dalam penelitian ini yakni kepala sekolah, TPPK, BK dan siswa SMP Negeri 1 Mantup. Observasi dilakukan oleh penulis dengan melakukan pengamatan terhadap pengimplementasian program Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 1 Mantup. Dokumentasi diperoleh melalui data yang menunjukkan pengimplementasian Gerakan Paduraksa, dimana salah satu program prioritas dari Gerakan Paduraksa tersebut adalah Sekolah Ramah Anak.

Pada penelitian ini keabsahan data dilakukan melalui uji kredibilitas dengan triangulasi Teknik. Menurut Sugiyono (2013:271) terdapat berbagai macam triangulasi diantaranya adalah triangulasi sumber, triangulasi Teknik, serta triangulasi waktu. Pada penelitian ini menggunakan

triangulasi teknik, dimana dalam menguji kebenaran penelitian dilakukan dengan sumber yang sama namun dengan Teknik yang berbeda. Teknik yang digunakan dalam memperkuat dalam pengujian kebenaran penelitian adalah wawancara, observasi serta dokumentasi. Dengan demikian pada penelitian ini data yang diperoleh melalui wawancara bersama kepala sekolah akan diperkuat melalui observasi dan dokumentasi pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 1 Mantup.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada Teknik analisis Milles Harberman (1984) dengan langkah penelitian diantaranya Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Pengumpulan data, pada tahap awal ini data penelitian dikumpulkan di lokasi penelitian melalui beberapa cara yakni wawancara, observasi serta dokumentasi. Reduksi data, Tahap ini merupakan proses pemilihan data dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Reduksi data dapat dilakukan dengan memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dalam penelitian, sehingga hasil dari reduksi data dapat menjadi lebih jelas. Hal ini dilakukan karena data penelitian dari lapangan yang diperoleh memiliki jumlah yang banyak karena konteks yang semakin melebar. Maka dari itu perlu adanya reduksi data agar hasil penelitian dapat lebih fokus pada tujuan penelitian.

Penyajian data atau display data, pada tahap ini data disajikan setelah direduksi. Melalui display data penulis akan menguasai serta memahami hasil yang didapatkan dari penelitian, serta dapat membuat rencana kerja yang akan dilakukan selanjutnya setelah memahami hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan data yang dikumpulkan pada tahap awal menjadi data yang bersifat sementara dan dapat berubah ketika terdapat perbedaan pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun jika data pada tahap awal tetap konsisten dengan tahap selanjutnya maka menjadi data yang kuat dan dapat dipercaya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Pengimplementasian Sekolah Ramah Anak (SRA) dibedakan melalui kegiatan di dalam pembelajaran dan di luar pembelajaran. Data pada aspek ini di peroleh melalui wawancara bersama dengan siswa, kepala sekolah serta koordinator TPPK, diperkuat dengan observasi pembelajaran di kelas serta dokumentasi kegiatan pembelajaran menyenangkan yang telah di upload pada media sosial youtube SMP Negeri 1 Mantup. Berdasarkan hasil wawancara bersama siswa mengungkapkan bahwasannya pembelajaran yang menyenangkan ditunjukkan melalui berbagai cara. Salah satu siswa mengatakan bahwa.

“Biasanya kita diajak belajar diluar kelas supaya tidak jenuh belajar di dalam kelas terus”. Ia juga

menambahkan “Waktu itu pelajaran IPA kita belajar di gazebo. Karena pelajaran IPA kan gampang membuat siswa bosan jadi guru kita mengajak untuk mencari suasana baru.” (Alil, 15 Januari 2025).

Siswa tersebut juga menyampaikan bahwasannya juga terdapat pembelajaran lainnya yang dilakukan di luar kelas agar siswa tidak merasa jenuh. Melalui pembelajaran yang menyenangkan siswa menyampaikan bahwasannya dapat lebih santai dan tidak tegang dalam pelajaran terutama pelajaran IPA yang sering dianggap membosankan oleh siswa. “Tentunya saya merasa senang karena pembelajaran IPA tidak lagi monoton dan membosankan seperti biasanya.” (Qowi, 7 Januari 2025). Saat diberikan pertanyaan pelajaran apalagi yang lebih menyenangkan Caesar kembali menjawab yakni pelajaran PAI. “Pelajaran PAI biasanya dilakukan di masjid dan itu pelajaran biasa bukan praktik.” (Caesar, 15 Januari 2025).

Dari pernyataan yang dilakukan siswa menunjukkan bahwasanya pengimplementasian SRA juga diwujudkan melalui pembelajaran di luar kelas yakni dengan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa dan tidak monoton. Siswa juga mengatakan bahwasannya terdapat pembinaan secara khusus dari BK selama 1 JP dalam satu minggu. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Denya sebagai berikut. “.... sekarang guru BK juga mengisi mata pelajaran. Jadi siswa juga lebih mudah mengetahui dan menangani kekerasan yang terjadi.” (Denya, 7 Januari 2025).

Dengan demikian pembinaan secara khusus dari guru BK melalui pembelajaran dapat memberikan edukasi kepada siswa mengenai kekerasan, terutama yang sering terjadi di sekolah yakni kekerasan psikis. Sebagaimana hasil wawancara bersama guru BK, bahwasannya kekerasan psikis masih banyak terjadi di sekolah. Sehingga peran guru sangat penting dalam meningkatkan kesadaran siswa terhadap dampak negatif kekerasan psikis.

Selain dari wawancara mengenai pembelajaran ramah anak di dalam kelas, diperkuat dengan observasi pembelajaran seni budaya yang dilakukan pada 14 Januari 2025. Berdasarkan hasil observasi, pembelajaran dilakukan dengan sangat menyenangkan, tidak ada kesan menekan siswa dalam pembelajaran. Pembelajaran berlangsung dari pukul 07.00 WIB hingga 09.00 WIB. Pembelajaran dibuka dengan doa dan sapaan guru, selama pembelajaran terdapat siswa yang telat masuk kelas, adanya kejadian tersebut guru memberikan respon dengan menegur siswa tersebut dan memberikan nasihat. Dari cara guru menegur dan memberikan nasihat, tidak ada satupun kata yang menyudutkan siswa dan membuat siswa tertekan secara psikis. Selain itu juga ditengah pembelajaran, guru menyadari terdapat salah satu siswa yang menggunakan make up cukup mencolok, namun guru juga memberikan

respon dengan menegur siswa dengan cara yang tidak menyinggung tetapi membuat siswa segan untuk mengulangi kesalahannya.

Disela pembelajaran, guru memberikan *ice breaking* tepuk *brig one* hingga *brig five* supaya tidak merasa bosan selama proses pembelajaran. Ketika siswa diperintahkan untuk maju menunjukkan penampilan sebagai tugas yang telah diberikan pada pertemuan sebelumnya, guru menekankan kepada setiap siswa untuk memberikan apresiasi kepada teman-temannya yang telah memberikan diri untuk tampil di depan kelas. Di akhir pembelajaran, guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk menyampaikan refleksi pembelajaran dengan bertanya “hal apa yang menyenangkan pada pembelajaran kali ini?” serta “hal apa yang kurang menyenangkan pada pembelajaran kali ini?”, dengan demikian siswa dapat menyampaikan perasaannya selama masa pembelajaran yang juga menjadi refleksi bagi guru dalam mengajar.

Berdasarkan hasil observasi tersebut menunjukkan bahwasannya serangkaian pembelajaran yang dilakukan oleh guru di dalam kelas telah merepresentasikan SRA, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya penghargaan terhadap hak-hak anak seperti hak untuk berpendapat serta hak untuk berpartisipasi di dalam kelas. Guru juga mengajarkan siswa untuk selalu mengapresiasi setiap hal yang dilakukan oleh temannya, terutama memberikan apresiasi atas keberanian teman ketika tampil di depan kelas.

Selain dilaksanakan di dalam pembelajaran, Sekolah Ramah Anak (SRA) juga dilaksanakan di luar pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara bersama informan, pelaksanaan SRA dilakukan dengan berbagai kegiatan yang melibatkan seluruh warga sekolah hingga pihak eksternal seperti orang tua, kepolisian, komite sekolah serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Lamongan. Berdasarkan hasil wawancara bersama siswa mengungkapkan bahwasannya kegiatan Sekolah Ramah Anak yang melibatkan siswa diantaranya melalui sosialisasi yang diberikan oleh pihak kepolisian dan dilakukan ketika Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), sosialisasi yang diberikan oleh pihak sekolah dan lembaga masyarakat, serta pengarahan dari bapak ibu guru BK terkait pelaksanaan Sekolah Ramah Anak.

Koordinator Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) menjelaskan terdapat beberapa cara yang dilakukan dalam mengimplementasikan SRA sebagai berikut.

“... kita melengkapi kriteria Sekolah Ramah Anak, mulai dari kelengkapan sarana dan prasarana, pelaksanaan program seperti sosialisasi, pembiasaan yang dilakukan sehari-hari, di setiap kelas juga kita pasang poster anti kekerasan.” (TPPK, 19 Februari 2025).

Koordinator TPPK juga mengatakan bahwasannya kegiatan edukasi Sekolah Ramah Anak juga secara khusus diberikan ketika kegiatan P5 “Ketika P5 mengangkat tema bangunlah jiwa ragaku. Jadi disitu juga diberikan edukasi tentang *bullying*, termasuk saat itu kita mengundang psikolog dan Departemen Agama untuk mengadukasi siswa secara langsung.” (TPPK, 19 Februari 2025).

Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak lainnya juga dilaksanakan melalui pembiasaan yang dilakukan sehari-hari, seperti yang disampaikan oleh Fani siswa kelas 9 sebagai berikut.

“Kita biasanya ada disiplin siswa yang dilakukan setiap hari, seperti pada hari senin pemeriksaan kerapian; hari selasa pemeriksaan kuku; hari rabu pemeriksaan kerapian rambut bagi anak laki-laki; hari kamis pemeriksaan sepatu siswa yang tidak diperbolehkan menggunakan flats shoes bagi siswa perempuan; serta pada hari jum’at pemeriksaan hasduk dan kaus kaki”. (Fani, 7 Januari 2025)

Fani juga menambahkan.

“...Yang membedakan setelah adanya Sekolah Ramah Anak ini dari tindakan yang dilakukan guru ketika ada siswa yang melanggar aturan. Dulu sebelum adanya Sekolah Ramah Anak tas siswa langsung diambil dan disuruh berlari mengelilingi lapangan, namun setelah adanya Sekolah Ramah Anak, guru hanya memberikan teguran; nasihat dan sudah tidak ada hukuman lari mengelilingi lapangan”. (Fani, 7 Januari 2025).

Siswa juga menyampaikan bahwasannya mereka merasakan dampak positif dari adanya Sekolah Ramah Anak, selain sudah tidak lagi terdapat hukuman fisik juga terdapat perbedaan lainnya yang disampaikan oleh siswa dimana mereka sudah tidak lagi merasakan adanya kekerasan psikis baik dari teman ataupun dari guru. “...Dulu waktu saya kelas 7 teman saya pernah di labrak sama kakak kelas namun sekarang sudah tidak pernah karena sekarang sudah ada pengarahan dari BK.” (Qowi, 7 Januari 2025).

Denya juga mengatakan bahwasannya “Ketika kelas 7 awal-awal masuk sekolah saya merasakan banyak senioritas terutama dari kakak kelas osis, jadi mereka itu mengolok-olok adik kelas karena merasa kalah cantik.” (Denya, 7 Januari 2025). Hal lain juga disampaikan oleh Alil bahwasannya “Saya juga pernah diolok-olok sama teman tapi saya cuek sampai saya jadi pendiam di kelas, terus akhirnya ada guru yang notice terus ditegur siswa tadi.” (Alil, 15 Januari 2025).

Mengurangnya kekerasan psikis sebagaimana yang diungkapkan oleh siswa juga disebabkan oleh adanya tata tertib anti *bullying* SMP Negeri 1 Mantup yang difokuskan pada kekerasan psikis, karena jenis kekerasan ini sering terjadi diantara siswa. Tata tertib tersebut mencakup tiga poin penting diantaranya ialah.

“(1) Menyebarkan fitnah/ menghasut, mengumpat atau berkata-kata kasar sesama siswa, melecehkan,

merendahkan orang lain berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) secara langsung maupun via medsos, (2) Mengancam dan menganiaya peserta didik lain, (3) Mengancam dan menganiaya guru, tenaga kependidikan atau karyawan.”

Berdasarkan keterangan pada poin 1, dapat disimpulkan bahwa kekerasan psikis menjadi perhatian serius karena kasus-kasus kekerasan psikis masih sering terjadi di sekolah seperti, menyebarkan fitnah/ menghasut; mengumpat atau berkata-kata kasar sesama siswa.

Selain beberapa pengimplementasian Gerakan Paduraksa seperti yang disampaikan oleh siswa, kepala sekolah serta koordinator TPPK juga menyampaikan bahwasannya sosialisasi dilakukan bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), psikolog serta Departemen Agama. Selain itu guru-guru juga aktif dalam menyuarakan gerakan anti perundungan yang di sebarkan kepada siswa dengan memanfaatkan sosial media telegram yang beranggotakan siswa SMPN 1 Mantup. Kepala sekolah juga mengungkapkan bahwasannya memberikan kesempatan bagi siswa untuk melaporkan adanya kejadian yang dirasa membuat siswa kurang nyaman di sekolah dengan membuat mata pelajaran khusus BK, sehingga siswa dapat lebih leluasa untuk melapor dan menjadi lebih dekat dengan guru BK.

Hambatan internal merupakan hambatan yang berasal dari dalam sekolah, baik dari peserta didik, pendidik/ guru maupun tenaga kependidikan. Kepala sekolah dari hasil wawancaranya menyatakan bahwasannya dari pihak siswa sejauh ini tidak ada hambatan yang terlalu besar dalam pengimplementasian SRA, sejak *launching* Gerakan Paduraksa serta seluruh kegiatan Sekolah Ramah Anak (SRA) selalu diikuti dan mendapat respon yang baik dari peserta didik, guru serta tenaga kependidikan. Hanya terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya yakni kurangnya komitmen siswa dalam menghapus kekerasan di sekolah, meskipun jika dibandingkan sebelum adanya program SRA, angka kekerasan secara psikis memiliki penurunan yang signifikan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Alil siswa kelas 9 menyatakan “Kami merasakan sekali penurunan angka kekerasan di sekolah, meskipun tidak bisa langsung menghilang tetapi semuanya dapat bertahap.” (Alil, 15 Januari 2025). Hambatan lain bagi sekolah dalam mewujudkan Sekolah Ramah Anak berdasarkan wawancara bersama kepala sekolah “Mungkin ada hambatan dari siswa yaitu siswa yang tidak mau melapor ketika mendapatkan kekerasan di sekolah.” (Kepala Sekolah, 9 Januari 2025). Di dukung dengan hasil wawancara bersama dengan koordinator TPPK sebagai berikut.

”Anak yang terkena *bullying* cenderung tidak mau ngomong, jadi tiba-tiba mereka tidak masuk

sekolah dan ketika ditanya tidak berani untuk mengungkapkan. Jadi guru baru tahu ketika melakukan *home visit*, baru siswa berani mengatakan kalau dia menjadi korban *bullying*.” (TPPK, 19 Februari 2025).

Alasan siswa enggan melapor ketika mendapatkan kekerasan psikis di sekolah telah tejawab dari wawancara bersama siswa. Mereka menyatakan bahwa melapor ke BK seringkali menyebabkan informasi tersebut menyebar ke teman-teman lainnya, yang justru memperburuk keadaan korban dengan membuatnya semakin disudutkan oleh pelaku. Kebocoran informasi ini terjadi karena setiap siswa yang memasuki ruang BK mendapat perhatian dari teman-temannya. Selain itu faktor penyebab lainnya ialah posisi ruang BK berdekatan dengan ruang kegiatan ekstrakurikuler yang sering ramai oleh siswa.

Begitupula dari pihak guru dan juga tenaga kependidikan, kepala sekolah mengatakan tidak ada hambatan dari kedua pihak tersebut. Keduanya memberikan respon yang positif dari adanya program SRA, hal tersebut ditunjukkan dari adanya ketaatan terhadap perubahan aturan-aturan di sekolah. Seperti, yang pada mulanya hukuman siswa yang melakukan pelanggaran adalah dengan berlari mengelilingi lapangan, namun setelah adanya Sekolah Ramah Anak guru mengubah hukuman yang diberikan kepada siswa menjadi hukuman yang tidak memberatkan siswa dari segi fisik. Begitu pula ketika guru di dalam kelas, siswa merasakan adanya perbedaan tindakan yang dilakukan oleh guru dalam menegur siswa yang melakukan kesalahan. Hal disampaikan oleh siswa “Dulu jika siswa belum mengerjakan PR, guru selalu memarahi dan membandingkan dengan kelas lainnya. Tapi sekarang guru hanya menegur biasa ga separah dulu.” (Fani, 7 Januari 2025).

Di dukung dari hasil observasi pembelajaran di dalam kelas pada 14 Januari 2025, ditemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, seperti datang terlambat, kurang mempersiapkan tugas yang diberikan oleh guru, dan menggunakan *make-up*. Guru memberikan teguran atas pelanggaran tersebut, teguran yang diberikan tidak menekan psikis siswa namun membuat siswa segan untuk mengulangi kesalahannya.

Dengan demikian dari hasil observasi yang menguatkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwasannya hambatan internal pelaksanaan Sekolah Ramah Anak yakni ketika siswa tidak berani melapor ketika menjadi korban, hal tersebut juga disebabkan karena Informasi mudah menyebar ketika melapor ke BK karena letak ruang BK yang berdekatan dengan ruang ekstrakurikuler. Selain itu, tidak ditunjukkan adanya hambatan internal lainnya, ditunjukkan melalui respon positif yang diberikan oleh siswa, guru, maupun tenaga

kependidikan, sejak diresmikannya Sekolah Ramah Anak melalui Gerakan Paduraksa di SMP Negeri 1 Mantup.

Hambatan eksternal ialah hambatan yang berasal dari pihak luar sekolah seperti orang tua, komite sekolah, pemerintah, kepolisian dan lain-lain. Kepala sekolah juga mengatakan bahwasannya tidak ada hambatan dari pihak eksternal, didukung dengan hasil wawancara bersama Koordinator TPPK sebagai berikut.

”Tidak ada hambatan eksternal, karena kita banyak komunikasi dengan pihak eksternal terkait pelaksanaan program dan mereka mendukung.” (TPPK, 19 Februari 2025).

Beberapa respon positif dari pihak eksternal ditunjukkan dari keterlibatan mereka terhadap program SRA di SMP Negeri 1 Mantup. Wujud respon positif orang tua siswa dengan turut serta dalam deklarasi Sekolah Ramah Anak Gerakan Paduraksa, hal tersebut dibuktikan dengan penandatanganan pada banner deklarasi Sekolah Ramah Anak (SRA). Deklarasi SRA di SMP Negeri 1 Mantup juga dihadiri oleh pemerintah kabupaten Lamongan bersamaan dengan launching gerakan Gerakan Paduraksa. Dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwasannya pelaksanaan program SRA mendapatkan respon positif baik dari orang tua maupun pemerintah kabupaten Lamongan.

Respon positif lainnya ditunjukkan dengan adanya sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), Dinas Pendidikan, IDI, Kemenag serta PKK Kabupaten Lamongan yang berkolaborasi untuk memberikan sosialisasi tentang “Edukasi Pencegahan Perkawinan Anak dengan Perspektif Agama dan Kesehatan Reproduksi dengan Sasaran Siswa-Siswi SMP se-Kabupaten Lamongan” di SMP Negeri 1 Mantup. Selain itu sosialisasi anti kekerasan dan *bullying* juga diberikan oleh kepolisian sektor Mantup kepada siswa SMP Negeri 1 Mantup pada Masa Pengenalan Lingkungan Persekolahan (MPLS). Dengan demikian menunjukkan bahwasannya tidak terdapat hambatan dari pihak eksternal dan dibuktikan dengan adanya dukungan terhadap pelaksanaan program SRA.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas menunjukkan bahwasannya tidak ada hambatan eksternal dalam pelaksanaan Sekolah Ramah Anak menjadi satu poin positif terhadap keberhasilan program. Dalam penelitian ini, keberhasilan program SRA di evaluasi dengan teori Implementasi Edward III, yang menekankan 4 faktor keberhasilan implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi.

Komunikasi diperlukan dalam menyukseskan keberhasilan program Sekolah Ramah Anak (SRA). Kepala sekolah dari hasil wawancaranya menyatakan bahwasannya, komunikasi telah dilakukan oleh guru dengan sangat baik. “Cara sekolah mengomunikasikan

program Sekolah Ramah Anak kepada peserta didik melalui sosialisasi, amanat ketika upacara atau apel, ada juga melalui pembinaan guru BK.” (Kepala Sekolah, 9 Januari 2025). Selain itu, komunikasi terkait pelaksanaan program SRA juga diberikan kepada guru, berdasarkan hasil wawancara bersama Koordinator TPPK menjelaskan sebagai berikut.

”Sosialisasi yang diberikan ke guru terkait pelaksanaan Sekolah Ramah Anak melalui rapat dinas serta pelatihan melalui PMM, disitu ada materi tentang kekerasan, jadi semua guru diwajibkan mempelajari itu dan harus diterapkan kepada siswa.” (TPPK, 19 Februari 2025).

Keberhasilan komunikasi yang dilakukan kepada siswa ditunjukkan melalui terpenuhinya hak anak yang dirasakan oleh siswa selama di sekolah. Berdasarkan wawancara bersama siswa terkait hak yang mereka rasakan semenjak adanya SRA sebagai berikut. ”Sejak Sekolah Ramah Anak itu lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk berpendapat, selain itu juga mendapatkan perlindungan dari kekerasan.” (Denya, 7 Januari 2025), dengan demikian menunjukkan bahwasannya siswa telah memahami hak yang mereka dapatkan selama di sekolah.

Didukung dengan hasil observasi yang dilakukan pada 14 Januari 2025, bahwasannya guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk melakukan refleksi terhadap pembelajaran. Sehingga siswa dapat mengungkapkan perasaan selama pembelajaran seperti membosankan atau menyenangkan. Dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwasannya guru telah memahami hak-hak anak, dengan menghargai hak anak untuk mengungkapkan pendapatnya. Sehingga komunikasi yang telah dilakukan kepada guru dan siswa dinyatakan berhasil, karena telah memahami serta mewujudkan pemenuhan hak-hak anak selama di sekolah.

Selain itu, kepala sekolah juga mengungkapkan bahwasannya pembinaan dilakukan kepada siswa melalui pemberian materi kekerasan saat Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). “... pemberian materi Sekolah Ramah Anak saat P5 tentang bagaimana melakukan pencegahan dan penanganan hingga tindakan yang dilakukan ketika menjadi korban atau melihat teman lainnya yang menjadi korban kekerasan.” (Kepala Sekolah, 9 Desember 2024).

Komunikasi sekolah mengenai program SRA bukan hanya ditujukan kepada seluruh warga sekolah, melainkan juga pihak eksternal seperti orang tua, lembaga masyarakat, dan juga masyarakat sekitar. Komunikasi diberikan kepada orang tua dibuktikan dengan kehadiran orang tua ketika penanda tanganan banner deklarasi Sekolah Ramah Anak serta deklarasi anti perundungan dan kekerasan SMP Negeri 1 Mantup. Dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa komunikasi antara sekolah

dengan orang tua siswa mengenai pelaksanaan program SRA berjalan dengan baik. Ditunjukkan dengan dukungan serta respon positif orang tua siswa yang turut serta menghadiri acara deklarasi Sekolah Ramah Anak serta launching Gerakan Paduraksa SMP Negeri 1 Mantup.

Berdasarkan hasil observasi pada 20 Januari 2025, berbagai cara komunikasi secara tidak langsung juga dilakukan oleh sekolah seperti melalui papan pengumuman, banner yang dipasang di dalam maupun di luar sekolah, serta komunikasi yang dilakukan melalui media sosial. Pemasangan banner tersebut bertujuan guna menginformasikan kepada masyarakat sekitar tentang program yang sedang dijalankan oleh sekolah, sehingga masyarakat dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan program, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Hal tersebut juga sejalan dengan penyampaian informasi melalui sosial media sekolah seperti Instagram dan youtube. Beberapa postingan mengenai Sekolah Ramah Anak diunggah di akun Instagram sekolah yakni @smpnegrilmantup dan @pkosissnesma, serta youtube sekolah SMP Negeri 1 Mantup. Melalui penyampaian informasi berbasis media sosial maka dapat menjangkau lebih banyak orang, untuk dapat mengetahui program SRA SMP Negeri 1 Mantup.

Sumber Daya dibedakan menjadi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Finansial. Sumber Daya Manusia mempengaruhi keberhasilan program Sekolah Ramah Anak, karena sekalipun komunikasi telah berjalan baik namun jika kurang maksimal dalam hal sumber daya maka pengimplementasian kebijakan juga tidak dapat berjalan secara efektif dan maksimal. Dukungan serta respon positif dari sumber daya manusia sangat mempengaruhi keberhasilan program. Sumber daya manusia di SMP Negeri 1 Mantup meliputi siswa, guru, dan tenaga kependidikan, berikut ialah rincian sumber daya manusia di SMP Negeri 1 Mantup.

Keberhasilan sumber daya manusia ditentukan dari dukungan serta respon positif yang diberikan. Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan kepala sekolah. “Seluruh warga sekolah memberikan respon positif dari adanya program Sekolah Ramah Anak.” (Kepala Sekolah, 9 Januari 2025). Dilanjutkan dengan pertanyaan bagaimana respon positif yang diberikan oleh warga sekolah.

“Respon positif ditunjukkan keterlibatan aktif seluruh warga sekolah baik siswa, guru, maupun tendik. Seperti waktu deklarasi Sekolah Ramah Anak semuanya berpartisipasi dan ikut menandatangani banner, selain itu juga menurunnya angka kekerasan di sekolah.” (Kepala Sekolah, 9 Januari 2025).

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Fani siswa kelas 9 sebagai berikut.

“.... Dulu sebelum adanya Sekolah Ramah Anak tas siswa langsung diambil dan disuruh berlari

mengelilingi lapangan, namun setelah adanya Sekolah Ramah Anak, guru hanya memberikan teguran; nasihat dan sudah tidak ada hukuman lari mengelilingi lapangan.” (Fani, 7 Januari 2025).

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwasannya keterlibatan aktif warga sekolah sebagai sumber daya manusia sangatlah penting sebagai faktor keberhasilan program SRA. keterlibatan aktif guru terhadap program ini ditunjukkan dengan menaati perubahan kebijakan yang lebih ramah anak seperti hukuman yang tidak lagi berorientasi pada hukuman fisik, menurunnya angka kekerasan antar siswa di sekolah, serta respon positif yang diberikan seluruh warga sekolah ketika acara deklarasi SRA di SMP Negeri 1 Mantup pada bulan Desember 2023.

Partisipasi siswa juga ditunjukkan melalui keterlibatan dalam pencegahan serta penanganan kekerasan di sekolah. Berdasarkan wawancara bersama siswa “....Pembina osis juga sering memberi tahu, kalau ada temannya yang di *bully* atau mau curhat, kalian bisa bantu terus laporkan ke guru BK.” (Alil, 15 Januari 2025). Di dukung dari hasil wawancara bersama TPPK sebagai berikut. “Tim PPK juga sering melibatkan siswa terutama osis untuk menjadi panitia ketika ada pihak eksternal melakukan sosialisasi di sekolah. Saat deklarasi juga melibatkan seluruh siswa, bukan hanya osis saja.” (TPPK, 19 Februari 2025). Dari wawancara tersebut menunjukkan bahwasannya siswa juga turut dilibatkan dalam pelaksanaan Sekolah Ramah Anak, baik dalam pencegahan maupun penanganan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, menunjukkan bahwasannya sumber daya manusia di SMP Negeri 1 Mantup telah mengimplementasikan Sekolah Ramah Anak (SRA) sebagaimana mestinya. Hal tersebut ditunjukkan dengan respon positif serta keterlibatan aktif dari seluruh warga sekolah, seperti keterlibatan aktif dalam deklarasi Sekolah Ramah Anak, guru yang menaati perubahan kebijakan yang lebih ramah anak seperti hukuman yang tidak lagi berorientasi pada hukuman fisik, menurunnya angka kekerasan psikis antar siswa, serta keterlibatan aktif osis sebagai mediator bagi siswa yang tidak berani melapor ke BK. Dengan demikian, hal tersebut menunjukkan bahwasannya sumber daya manusia SMP Negeri 1 Mantup telah melaksanakan SRA dengan baik.

Sumber Daya Finansial berperan dalam mendukung pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah. Ketersediaan finansial yang cukup menjamin pemeliharaan dan perbaikan fasilitas agar tetap dalam kondisi yang layak pakai. Hal tersebut karena Sekolah Ramah Anak bukan hanya berorientasi pada cara memberikan perlindungan terhadap anak, namun juga mewujudkan lingkungan sekolah yang nyaman dan aman bagi siswa. Kepala sekolah dari hasil wawancaranya mengenai fasilitas atau

lingkungan khusus dalam menciptakan Sekolah Ramah Anak, menyatakan sebagai berikut.

“Sekolah sudah menyediakan fasilitas yang memadai supaya siswa merasa nyaman di sekolah. Ada tiga gazebo untuk siswa belajar di ruang kelas, ada juga taman bermain untuk siswa selama istirahat yang dikelilingi pohon sehingga lebih terasa sejuk, dan ada ruang konseling untuk menampung keluh kesah siswa.” (Kepala Sekolah, 9 Januari 2025).

Dari hasil wawancara bersama dengan kepala sekolah diatas, diperkuat dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti. Menurut hasil pengamatan, SMP Negeri 1 Mantup memiliki lingkungan yang asri sehingga menciptakan rasa nyaman bagi warga sekolah. SMP Negeri 1 Mantup memiliki hutan sekolah sebagai ruang terbuka hijau dan tempat refreking siswa setelah jenuh pembelajaran di kelas. Terdapat pula tiga gazebo yang dikelilingi dengan pohon yang rindang, selain sebagai tempat istirahat bagi siswa, juga dijadikan sebagai ruang belajar terbuka bagi siswa karena telah disediakan beberapa buku bacaan. Area berjalan siswa juga dibuat senyaman mungkin dengan permukaan yang rata dan menggunakan paving block, sehingga memberikan kenyamanan bagi siswa ketika menuju ke ruang kelas, kantin, ataupun lapangan.

Sekolah juga memiliki berbagai fasilitas yang menunjang pembelajaran siswa, seperti laboratorium; perpustakaan; serta ruang multimedia. Dengan pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas belajar siswa maka segala kebutuhan siswa di sekolah dapat terpenuhi dengan baik, sehingga siswa dapat belajar dengan nyaman. Dengan pengelolaan sumber daya finansial secara efektif dan efisien terhadap pemeliharaan serta pengembangan sarana dan prasarana sekolah, maka SMP Negeri 1 Mantup mampu mendukung pelaksanaan program SRA secara efektif. Adanya prasarana fisik yang memadai serta manajemen sekolah yang peduli terhadap kebutuhan siswa menjadi landasan kuat dalam menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan inklusif.

Disposisi ditunjukkan melalui komitmen dari seluruh warga sekolah dalam mengimplementasikan SRA. Keberhasilan program ini bergantung pada komitmen dalam tindakan nyata yang dilakukan oleh semua pihak di lingkungan sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan hingga siswa itu sendiri. Program anak berjalan dengan baik dan berhasil jika terdapat komitmen dari seluruh warga sekolah, begitu pula sebaliknya program dikatakan tidak berjalan dengan baik atau gagal apabila warga sekolah sebagai implementator tidak menunjukkan komitmen dalam melaksanakan program.

Kepala sekolah dari hasil wawancaranya mengenai komitmen yang dilakukan oleh guru terhadap pelaksanaan Sekolah Ramah Anak, menyatakan sebagai berikut.

“Seluruh guru memiliki komitmen dalam melaksanakan Sekolah Ramah Anak, misalnya dulu hukuman yang diberikan guru ketika ada siswa yang nakal lebih ke hukuman fisik, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi. Sekarang memberikan teguran atau nasihat ke siswa.” (Kepala Sekolah, 9 Januari 2025).

Hal tersebut diperkuat oleh wawancara bersama siswa mengenai perubahan perilaku guru ketika menegur siswa sesudah adanya Sekolah Ramah Anak.

“... Dulu sebelum adanya Sekolah Ramah Anak tas siswa langsung diambil dan disuruh berlari mengelilingi lapangan, namun setelah adanya Sekolah Ramah Anak, guru hanya memberikan teguran; nasihat dan sudah tidak ada hukuman lari mengelilingi lapangan.” (Fani, 7 Januari 2025).

Dari kedua hal tersebut menunjukkan bahwasannya guru dan tenaga kependidikan telah memiliki komitmen yang baik dalam melaksanakan Sekolah Ramah Anak. Komitmen guru ditunjukkan melalui perubahan tindakan yang dilakukan oleh guru dalam menindak siswa yang melakukan kekerasan. Dimana sebelumnya guru menindak dengan hukuman fisik, namun setelah adanya Sekolah Ramah Anak guru tidak lagi menindak dengan hukuman yang berorientasi pada kekerasan fisik.

Komitmen yang ditunjukkan oleh siswa dalam mengimplementasikan Sekolah Ramah Anak ialah ditunjukkan dengan menurunnya angka kekerasan terutama secara psikis yang terjadi di lingkungan sekolah. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan bersama kepala sekolah sebagai berikut. “Komitmen siswa dapat dilihat dari turunnya angka kekerasan yang terjadi antar siswa. Data-datanya bisa dilihat di BK.” (Kepala Sekolah, 9 Januari 2025). Begitupula dengan hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan Koordinator TPPK “Tim PPK setiap bulan selalu memantau data kekerasan di BK, dan alhamdulillah setiap kita memantau ada penurunan angka kekerasan.” (TPPK, 19 Februari 2025).

Diperkuat dengan data yang dimiliki oleh BK mengenai kekerasan yang dilakukan oleh siswa (terlampir). Data menunjukkan bahwasannya pada rentang Januari hingga November 2023 terdapat enam kasus kekerasan secara psikis yang dilakukan antar siswa. Sedangkan pada rentang bulan Desember 2023 hingga bulan Februari 2025 terhitung sejak deklarasi Sekolah Ramah Anak dilaksanakan, tidak terdapat kasus kekerasan secara psikis yang terjadi antar siswa. Dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwasannya siswa menunjukkan komitmennya dalam upaya menghapus kekerasan terutama psikis yang sering terjadi di sekolah.

Struktur birokrasi yakni pemegang program yang mengatur mengenai jalannya program Sekolah Ramah

Anak (SRA), sehingga program SRA dapat berjalan secara terstruktur. Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 1 Mantup, Kepala sekolah memegang tanggung jawab terhadap pelaksanaan program. Dalam hal perencanaan program, pengelolaan sarana dan prasarana, hingga pelaksanaan sosialisasi terkait kebijakan dan program SRA merupakan tugas dari TPPK. Sehingga segala perencanaan program yang telah disusun oleh TPPK harus meminta persetujuan kepala sekolah terlebih dahulu.

Sebagaimana yang tertuang dalam rencana kegiatan TPPK dalam mewujudkan Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 1 Mantup, menunjukkan adanya peran kepala sekolah dalam menentukan pelaksanaan program, diantaranya.

”(1) Menyampaikan usulan/ rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan (kepala sekolah). (2) Memberikan masukan/ saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan, (3) Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan.”

Dengan demikian kepala sekolah memiliki peran sebagai pengawas serta pengarah pelaksanaan Sekolah Ramah Anak, sedangkan TPPK bertugas merumuskan serta menyusun program serta menjamin fasilitas sekolah yang aman dan nyaman agar sesuai dengan kriteria Sekolah Ramah Anak.

### Pembahasan

Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak (SRA) di SMP Negeri 1 Mantup melalui Gerakan Paduraksa dilaksanakan sejak 2023. SMP Negeri 1 Mantup menjadi pusat launching Gerakan Paduraksa berdasarkan pada Surat Edaran dan juknis Gerakan Paduraksa Nomor 400.5.4/ 3376/ 413.101/ 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Implementasi SRA akan dikaji untuk mengetahui tahapan yang telah dicapai oleh sekolah, dengan mengelompokkan pelaksanaan program ke dalam dua aspek yakni, pembelajaran di dalam pembelajaran dan implementasi di luar pembelajaran.

Berdasarkan hasil penelitian di dalam pembelajaran dan di luar pembelajaran, maka dapat diketahui tahapan yang dicapai oleh SMP Negeri 1 Mantup sesuai kriteria yang ada. SMP Negeri 1 Mantup telah mencapai tahap Maju, ditunjukkan dengan terpenuhinya kriteria-kriteria berikut. Pertama, terpenuhinya 6 komponen kriteria pada tahap Mampu, dimana tahap Mampu memiliki 6 kriteria khusus diantaranya, kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA); pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak; proses belajar yang ramah anak; sarana dan prasarana sekolah ramah anak; partisipasi anak; serta

partisipasi orang tua, lembaga masyarakat dan dunia usaha.

Kebijakan Sekolah Ramah Anak ditunjukkan melalui adanya tata tertib anti *bullying* yang berisikan upaya pencegahan; penanganan; pembinaan serta sanksi baik terhadap siswa maupun guru dan tenaga kependidikan. Kriteria berikutnya adalah pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak. Sebagaimana yang tertuang dalam tata tertib anti *bullying* pada poin pencegahan yang dilakukan oleh guru dan tenaga kependidikan, Guru SMP Negeri 1 Mantup mendapatkan pelatihan mengenai hak-hak anak. Hal tersebut diwujudkan melalui pembelajaran yang menjamin hak anak untuk berpendapat, ditunjukkan dengan refleksi yang dilakukan oleh siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran. Serta mewujudkan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan di sekolah, melalui beberapa kegiatan yang dilakukan seperti menyediakan ruang aduan bagi siswa, serta berbagai upaya pencegahan yang dilakukan.

Proses belajar di SMP Negeri 1 Mantup juga mengedepankan prinsip ramah anak. Pembelajaran yang menyenangkan dengan berbagai metode yang dilakukan oleh guru mata pelajaran. Cara guru mengajar menunjukkan adanya kedekatan antara guru dengan siswa sehingga pembelajaran berlangsung menyenangkan mulai dari adanya *ice breaking*, apresiasi terhadap teman, refleksi yang dilakukan siswa terhadap proses pembelajaran, pembelajaran di luar kelas, dll.

Sarana dan prasarana sekolah juga telah memenuhi kriteria ramah anak, dengan adanya fasilitas yang menunjang pembelajaran dan memberikan kenyamanan bagi siswa di sekolah. Diwujudkan melalui kelengkapan ruang multimedia, laboratorium, gazebo, hutan sekolah, area berjalan yang aman bagi siswa. Partisipasi siswa secara aktif terhadap setiap kegiatan, juga turut menunjang program SRA seperti sosialisasi, keterlibatan osis sebagai mediator antara guru BK dengan siswa korban kekerasan yang tidak berani melapor, pembiasaan kegiatan setiap hari, menaati aturan ramah anak sehingga angka kekerasan di sekolah dapat menurun, dll.

Keterlibatan orang tua siswa dalam deklarasi Sekolah Ramah Anak (SRA) yang ditunjukkan dengan penandatanganan banner SRA oleh orang tua siswa. Partisipasi lembaga masyarakat ditunjukkan dengan sosialisasi anti kekerasan dan *bullying* yang diberikan oleh kepolisian sektor mantup, Psikolog, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), Dinas Pendidikan, IDI, Kemenag serta PKK Kabupaten Lamongan.

Kedua, Adanya Kegiatan Penguatan dan Pendampingan serta Fasilitasi dari Pemerintah Daerah. Hal tersebut telah ditunjukkan ketika pelaunching

gerakan paduraksa, dimana bupati Kabupaten Lamongan mendatangi SMP Negeri 1 Mantup guna melakukan penguatan dan pendampingan serta launching gerakan paduraksa, serta sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Ketiga, Mengimbaskan SRA ke Satuan Pendidikan lainnya. Pengimbasan dilakukan secara tidak langsung dengan memasang banner dan sosial media mengenai sekolah ramah anak, sehingga dapat memotivasi sekolah lain dalam melaksanakan sekolah ramah anak. Serta telah direncanakan untuk mengimbasakan SRA ke satuan pendidikan lainnya dengan melalui forum MGMP.

Capaian SMP Negeri 1 Mantup pada tahap maju dalam melaksanakan Sekolah Ramah Anak (SRA), juga masih terdapat hambatan. Berdasarkan hasil penelitian, hambatan pelaksanaan SRA di SMP Negeri 1 Mantup berasal dari hambatan internal, yakni masih adanya kekerasan psikis yang terjadi meskipun data menunjukkan bahwa angka kekerasan psikis di sekolah telah mengalami penurunan. Selain itu siswa yang juga berani melapor ketika menjadi korban kekerasan, karena informasi dapat dengan mudah menyebar diantara teman-temannya.

Adanya kekerasan psikis yang masih terjadi diantara siswa, pihak sekolah dapat meningkatkan pendidikan karakter bagi siswa. Hal tersebut karena karakter yang dimiliki oleh siswa berbeda-beda, sehingga dengan pendidikan karakter dapat memperbaiki karakter setiap siswa seiring berjalannya waktu. Selain itu juga diperlukan forum aduan secara *online*, sehingga identitas siswa akan terjaga dan juga meningkatkan keberanian siswa untuk melapor ketika menjadi korban kekerasan.

Evaluasi pelaksanaan Sekolah Ramah Anak (SRA) dilakukan guna mengukur keberhasilan pelaksanaan program. Pada penelitian ini, evaluasi program dilakukan menggunakan teori Implementasi Edward III. Analisis tersebut bertujuan untuk menentukan sejauh mana program Sekolah Ramah Anak telah berhasil dilaksanakan.

Komunikasi telah dilakukan dengan baik melalui beberapa bentuk komunikasi yang dilakukan oleh pihak sekolah, yakni komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Keberhasilan komunikasi pengimplementasian SRA ditunjukkan melalui pemahaman siswa dan guru terkait hak-hak anak di sekolah. Dimana siswa telah memahami hak-hak mereka selama di sekolah, guru juga telah menunjukkan pemenuhan hak anak dengan memberikan perlindungan terhadap siswa dari kekerasan serta memberikan hak siswa untuk berpendapat. Melalui kedua hal tersebut menunjukkan bahwasannya proses komunikasi yang dilakukan oleh sekolah kepada guru dan juga siswa terkait Sekolah Ramah Anak telah berhasil dilaksanakan.

Komunikasi tidak langsung yang dilakukan melalui banner dan media sosial, SMP Negeri 1 Mantup bukan hanya sekedar memberikan informasi, namun secara tidak langsung juga dapat memberikan motivasi kepada satuan pendidikan lainnya mengenai pentingnya Sekolah Ramah Anak (SRA). Hal tersebut juga sejalan dengan capaian SRA SMP Negeri 1 Mantup yakni pada tahap Maju, dimana sekolah harus dapat mengimbaskan kepada satuan pendidikan lainnya. Meskipun kepala sekolah telah mengatakan bahwa pengimbasan juga akan dilakukan melalui forum sosialisasi bersama MGMP.

Seluruh warga sekolah sebagai sumber daya manusia berhasil menunjukkan adanya perubahan positif di sekolah. Terlihat dari keterlibatan secara aktif seluruh warga sekolah semenjak di deklarasikan nya SRA di SMP Negeri 1 Mantup baik siswa, guru maupun tenaga kependidikan. Perubahan positif lainnya terlihat dari menurunnya angka kekerasan psikis di sekolah, yang menjadi indikator keberhasilan program. Hal ini menunjukkan bahwa program SRA tidak hanya berhasil diterapkan, tetapi juga memberikan dampak yang signifikan dalam menciptakan suasana belajar yang lebih baik dan ramah bagi seluruh siswa.

Sumber daya finansial yang stabil dapat mendukung sarana dan prasarana yang memadai dan menjamin kenyamanan siswa di sekolah. Berbagai kelengkapan prasarana yang menunjang pembelajaran siswa di SMP Negeri 1 Mantup ditunjukkan dengan adanya laboratorium; perpustakaan; gazebo; serta ruang multimedia. Selain itu sarana ramah anak juga dibangun guna memberikan kenyamanan bagi siswa, seperti area berjalan yang rata sehingga tidak membahayakan siswa ketika melewatinya, serta hutan sekolah sebagai ruang terbuka hijau dan tempat refreshing siswa setelah jenuh pembelajaran di kelas. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sumber daya finansial SMP Negeri 1 Mantup yang stabil dan dikelola dengan baik berhasil mendukung penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Semua fasilitas yang ada tidak hanya mendukung proses pembelajaran, tetapi juga memberikan ruang bagi siswa untuk beristirahat dan menyegarkan pikiran, sehingga meningkatkan kualitas pengalaman belajar siswa di sekolah.

Disposisi merupakan karakter dari implementator dalam mengimplementasikan kebijakan yang ada, misalnya komitmen dan kejujuran. Kebijakan akan berjalan dengan baik dan sesuai tujuan jika implementator juga memiliki disposisi yang baik, begitu sebaliknya kebijakan akan berjalan tidak efektif apabila implementator memiliki sikap yang berbeda dalam menjalankan kebijakan. Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwasannya komitmen telah ditunjukkan oleh seluruh warga sekolah baik siswa; guru; maupun

tenaga kependidikan. Komitmen yang diberikan oleh guru ditunjukkan dengan perubahan hukuman yang diberikan kepada siswa yang awalnya berupa hukuman fisik namun telah berubah menjadi hukuman yang lebih mendidik siswa, selain itu pembelajaran yang dilakukan oleh guru juga telah mengalami perubahan menjadi lebih menyenangkan dan tidak menekan siswa.

Komitmen siswa juga ditunjukkan dengan menurunnya angka kekerasan psikis di sekolah. Meskipun kekerasan psikis belum sepenuhnya hilang, namun penurunan yang terjadi cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan memerlukan proses bertahap untuk mencapai hasil yang optimal. Penurunan angka kekerasan ini mencerminkan keberhasilan berbagai upaya yang telah dilakukan, seperti peningkatan kesadaran siswa terkait kekerasan, penguatan dari guru sebagai pendamping, serta kerja sama yang erat antara sekolah dengan pihak eksternal seperti orang tua, lembaga masyarakat serta lembaga pemerintahan.

Struktur Birokrasi menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam pengimplementasian program Sekolah Ramah Anak (SRA). Kepala sekolah sebagai penanggung jawab tertinggi dalam pelaksanaan program SRA, segala keputusan serta perencanaan program tidak lepas dari persetujuan Kepala Sekolah. Hingga evaluasi yang dilakukan minimal satu tahun sekali kepada Dinas Pendidikan, juga melalui Kepala Sekolah. Dalam hal perencanaan program, pengelolaan sarana dan prasarana, hingga pelaksanaan sosialisasi terkait kebijakan dan program SRA merupakan tugas dari TPPK. Dengan demikian kepala sekolah memiliki peran sebagai pengawas serta pengarah pelaksanaan Sekolah Ramah Anak, sedangkan TPPK bertugas merumuskan dan menyusun program serta menjamin fasilitas sekolah yang aman dan nyaman agar sesuai dengan kriteria SRA atas persetujuan kepala sekolah.

Berdasarkan hasil pembahasan terkait evaluasi pelaksanaan SRA, dapat disimpulkan bahwasannya pelaksanaan SRA di SMP Negeri 1 Mantup dapat dikatakan berhasil, dengan mengevaluasi sesuai dengan teori Implementasi Edward III, yang menekankan pentingnya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam mendukung keberhasilan sebuah kebijakan. Sekolah juga melakukan evaluasi setiap satu tahun sekali kepada Dinas Pendidikan, namun evaluasi hanya berjalan satu arah dari pihak sekolah saja. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi secara khusus yang dirancang oleh Pemerintah Daerah agar evaluasi pelaksanaan Sekolah Ramah Anak melalui Gerakan Paduraksa dapat terukur secara lebih efisien.

Evaluasi yang dilakukan, dengan mendasar pada faktor keberhasilan dalam teori Implementasi Edward III, juga berperan dalam mendukung pemenuhan kriteria Sekolah

Ramah Anak pada tahap Maju. Dimana Kriteria Maju yang telah dicapai oleh SMP Negeri 1 Mantup tidak dapat dikatakan berhasil apabila tidak didukung oleh komunikasi yang baik, sumber daya manusia yang mendukung, disposisi/ komitmen dari seluruh warga sekolah, serta struktur birokrasi yang efisien.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, SMP Negeri 1 Mantup telah mencapai tahap Maju dalam mengimplementasikan Sekolah Ramah Anak (SRA) melalui Gerakan Paduraksa, dengan mendasar pada juknis Gerakan Paduraksa Nomor 400.5.4/ 3376/ 413.101/ 2023. Hal tersebut ditunjukkan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan baik dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Hambatan internal masih menjadi kendala dalam pelaksanaan SRA di SMP Negeri 1 Mantup. Hambatan utama yakni masih terjadi kekerasan psikis di sekolah. Meskipun berdasarkan data, kekerasan psikis di sekolah telah turun secara signifikan. Namun hal tersebut dikarenakan siswa tidak mau melapor ketika mendapatkan kekerasan. Serta Pelaksanaan SRA di SMP Negeri 1 Mantup dikatakan berhasil, karena telah memenuhi syarat keberhasilan implementasi kebijakan berdasarkan Teori Implementasi Edward III. Teori ini menekankan pentingnya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai elemen utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

### Saran

Setelah membahas implementasi program Sekolah Ramah Anak melalui Gerakan Paduraksa, maka terdapat saran-saran yang diberikan diantaranya, Peningkatan pendidikan karakter kepada siswa, Pengembangan kegiatan yang menarik dan kreatif, Pengimbasan ke satuan pendidikan lainnya, Pembuatan forum aduan secara *online*, serta Pembuatan Standar Evaluasi oleh Pemerintah.

### Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada SMP Negeri 1 Mantup yang telah memberikan kesempatan dalam melaksanakan penelitian ini. Ucapan terimakasih juga ditujukan kepada semua pihak yang memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, I., & Kunaenih, K. (2023). Pengaruh Sekolah Ramah Anak Terhadap Motivasi Belajar Siswa ( Studi Analisis Smkn 40 Jakarta ). *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 5(1), 447–449.
- Candra, M. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Herianto, E., Jahiban, M., & Dahlan, D. (2020). Pola

- Perlindungan Anak dalam Dimensi Sekolah Ramah Anak di Sekolah/Madrasah Kota Mataram. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 6(2), 180–181.
- Iis Margiyanti, & Siti Tiara Maulia. (2023). Kebijakan Pendidikan Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun. *Jurnal Pendidikan Dan Sastra Inggris*, 3(1), 202–207.
- Molzana, L., & Fernandes, R. (2023). Program Sekolah Ramah Anak dalam Mewujudkan Pendidikan Anti Kekerasan di Sekolah (Studi Kasus di SMAN 3 Bukittinggi). *Naradidik: Journal of Education and Pedagogy*, 2(1), 88–94.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak
- Saraswati, R. (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (p. 138). Semarang: PT Citra Aditya Bakti.
- Shofiyatuzzahrah, A., Amanda, A., Rizal, H., Rianti, M., Siregar, M., Insani, N. N., & Rozak, R. W. A. (2023). Rekonstruksi Sekolah sebagai Lingkungan yang Paling Aman Bagi Siswa di Tengah Maraknya Kasus Kekerasan kepada Anak. *Seroja: Jurnal Pendidikan*, 2(2), 1–10.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta.
- Surat Edaran dan juknis Gerakan Paduraksa Nomor 400.5.4/ 3376/ 413.101/ 2023
- Wahyuningsih, S. (2013). *Metode Penelitian Studi Kasus*. Madura: UTM PRESS.